



-O %ULJMHQG 6XGLDUWR .0  
7HOS

.RPSOHNV 7I  
)D[



## **URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **A. KEBIJAKAN PROGRAM**

*Pelaksanaan urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang, yang keberhasilannya dapat dilihat dari persentase capaian indikator tujuan pembangunan daerah Kota Semarang.*

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program ini diarahkan pada terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan sarana prasarana aparatur dalam menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah, perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas.
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana  
Program ini diarahkan saat terjadi bencana yaitu evakuasi serta memberi bantuan kepada korban bencana, untuk melatih berbagai elemen masyarakat dalam rangka kesiap-siagaan dalam penanganan bencana serta penyebarluasan informasi terkait bencana, pasca bencana dengan pemulihan dan pembangunan ulang infrastruktur akibat bencana.
  - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

### **B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN SUB KEGIATAN**

#### **1. REALISASI KEUANGAN**

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 sebesar :



Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp. 24.275.681.669	Rp. 23.006.530.038	94,77

Adapun perincian pelaksanaan program dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	24.275.681.669	23.006.530.038	94,77
	OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>8.820.384.228</b>	<b>8.312.419.209</b>	<b>94,24</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.264.010</b>	<b>18.264.010</b>	<b>100,00</b>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.724.218	10.724.218	100,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.632.733	1.632.733	100,00
	c. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.614.600	1.614.600	100,00
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.588.050	1.588.050	100,00
	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.704.409	2.704.409	100,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.919.591.919</b>	<b>6.569.133.328</b>	<b>94,94</b>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.687.682.669	6.391.803.328	95,58
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.931.000	176.730.000	77,88
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.557.300	300.000	19,26
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.556.350	300.000	19,28
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>494.336.330</b>	<b>438.766.050</b>	<b>88,76</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.095.998	10.869.000	89,86
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.801.560	10.675.000	90,45



	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.533.974	56.295.100	96,18
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.343.617	9.543.000	92,26
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.945.981	41.299.000	91,89
	f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000	14.375.000	91,27
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.838.000	119.638.450	95,83
	h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	216.027.200	176.071.500	81,50
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>608.978.005</b>	<b>594.778.061</b>	<b>97,67</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.996.000	2.970.000	99,13
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.105.296	190.040.893	93,57
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.876.709	401.767.168	99,72
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>779.213.964</b>	<b>691.477.760</b>	<b>88,74</b>
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.410.000	274.772.900	90,56
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.170.000	235.322.200	82,81
	c. Pemeliharaan Mebel	4.400.000	4.345.000	98,75
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.944.264	88.276.700	92,01
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.289.700	88.760.960	97,23
<b>B</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.455.297.441</b>	<b>14.694.110.829</b>	<b>95,07</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</b>	<b>384.939.000</b>	<b>362.046.500</b>	<b>94,05</b>
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	87.839.000	87.100.000	99,16
	b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	297.100.000	274.946.500	92,54
<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>12.419.864.024</b>	<b>11.887.279.850</b>	<b>95,71</b>
	a. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	107.083.489	101.985.540	95,24
	b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	375.789.740	359.480.000	95,66
	c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	391.537.094	343.256.400	87,67
	d. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	11.545.453.701	11.082.557.910	95,99



<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>2.449.443.512</b>	<b>2.280.349.546</b>	<b>93,10</b>
	a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.411.960.972	1.263.432.536	89,48
	b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.037.482.540	1.016.917.010	98,02
<b>4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>201.050.905</b>	<b>164.434.933</b>	<b>81,79</b>
	a. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	201.050.905	164.434.933	81,79

## 2. HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil kinerja lainnya dari pelaksanaan Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Semarang pada tahun 2021 adalah tersusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pencapaian hasil-hasil kinerja tersebut di atas diperoleh melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut :

Capaian pada Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Indeks Resiko Bencana	128,80	111.62	86,67	113.83
2.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	25	25	100	20
3.	Rasio penanganan korban bencana	100%	100%	100	100%

### 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (BPBD)	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%
3.	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (BPBD), Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur, Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dari yang ditargetkan 100% menjadi 100% , atau berhasil mencapai target 100%.



## 2) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	100%	100%	100	100%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase cakupan pemulihan pasca bencana dari yang ditargetkan 100% menjadi 100%, atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

### SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- (1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- (2) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- (3) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- (4) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- (5) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

**SUB KEGIATAN YANG GAGAL** --- nihil ---

### C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Target sasaran telah dapat terealisasi sesuai tingkat capaian yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan hambatan atau kendala dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,

- a. Kurangnya kompetensi SDM aparatur;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
- c. Kurangnya koordinasi lintas sektor.

### D. SOLUSI

Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah (solusi) dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Mengadakan atau diklat pendidikan dan pelatihan teknis tentang bencana;
- b. Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana/ pasca bencana
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;



**E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

---NIHIL---

**F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN**

---NIHIL---

**G. REKOMENDASI DPRD**

---NIHIL---

Mengetahui dan menyetujui,  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SEMARANG



**Ir. A. RUDIANTO, MT**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630617 199203 1 008